

Dr. Mohammad Rusli Syuaib, S.Sos., M.Si



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

**MOHAMMAD RUSLI SYUAIB.** Penulis Lahir di Poso pada 08 Februari 1976. Saat ini sebagai Staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso (UNSIMAR) Poso. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2015-2019 dan sekaligus sekarang menjabat sebagai Wakil Rekror Bidang Perencanaan Keuangan Universitas Sintuwu Maroso

**Riwayat Pendidikan Penulis Sebagai berikut:** SD Neg 6 Poso Tamat Tahun 1989, SMP Neg 2 Poso Tamat Tahun 1992, SMA Neg 1 Poso Tamat Tahun 1995, Sarjana Sosial Universitas Tadulako Palu Tahun 2000, Magister Adminitrasi Publik Universitas Tadulako Palu 2011, Doktor Ilmu Sosial BKU administrasi Publik Univesitas Tadulako 2020.

**Pekerjaan di Lingkungan Universitas Sintuwu Maroso** yaitu Dosen Tetap Universitas Sintuwu Maroso, Ketua Program Studi Administrasi Publik 2015, Dekan Fakultas Fisip Tahun 2015-2019, Ketua Lembaga Penelitian Tahun 2019-2023, Wakil Rektor Bidang Sekertariat Humas serta Bantuan Hukum Tahun 2019-202, Wakil Rektor Bidang Keuangan 2019-202, Wakil Rektor Bidang Keuangan 2023-2027 dan Senat Universitas Sintuwu Maroso serta.

**Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah** yaitu Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso 2003-2008, Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022, Tim Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022, Tim percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022, Tenaga Ahli Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022, Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Sekertariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 serta Assesor Beban Kerja Dosen (BKD).

**Riwayat Organisasi** yaitu : pengurus Asosiasi perguruan Tinggi Swasta Sulawesi Tengah (APTISI), IAPA, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Poso, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso, Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab Poso, Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Poso, KORMI Kabupaten Poso, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG), Keluarga Jantung Sehat Indonesia (KJSI) Kab Poso, Lembaga Dakwa Kampus (LDK), Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Tadulako.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-425-7



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

Dr. Mohammad Rusli Syuaib, S.Sos., M.Si



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

**Penulis** : Dr. Mohammad Rusli Syuaib, S.Sos., M.Si

**Editor** : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Amini Nur Ihwati

**ISBN** : 978-623-120-425-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan desa. Kebijakan dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal karena pemerintah desa lebih fokus pada infrastruktur desa bukan pada program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan kebijakan dana desa terhadap angka kemiskinan dan pengangguran bisa dikurangi karena setiap pekerjaan dan kegiatan yang ada di desa melibatkan masyarakat dan masyarakatpun mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA.....</b>	<b>7</b>
A. Administrasi Negara.....	7
B. Model Administrasi Negara.....	16
<b>BAB 3 KEBIJAKAN PUBLIK .....</b>	<b>22</b>
A. Kebijakan Publik.....	22
B. Implementasi Kebijakan Publik .....	25
C. Kebijakan Publik Sebagai Dimensi Strategi Administrasi Publik .....	29
<b>BAB 4 MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN .....</b>	<b>46</b>
A. Model Van Meterdan Van Horn .....	46
B. Model Mazmanian dan Sabatier .....	48
C. Model Hoogwood & Gun .....	51
D. Model George Edwards III .....	53
E. Model Van Meterdan Van Horn .....	60
F. Model Grindle.....	62
G. Model Elmore, LipkyHjem & O. Porter.....	64
H. Model Jan Merse.....	66
I. Model Warwic .....	67
J. Model Rippley dan Franklin .....	68
K. Model Charles Jones.....	69
L. Model Nakamura& Smallwood .....	70
M. Model Jaringan .....	72
N. Model RichardMatland.....	73
O. Model Implementasi Kebijakan Top-down .....	73
P. Model Implementasi Kebijakan Bottom-up .....	74
Q. Model Goggin, Bowman, dan Lester .....	78
<b>BAB 5 KEBIJAKAN DANA DESA.....</b>	<b>81</b>
A. Kebijakan Penggunaan Dana Desa .....	81
B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	85
C. Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa .....	88

DAFTAR PUSTAKA .....	110
TENTANG PENULIS .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1.	Model Implementasi Kebijakan Van Meter .....	47
Gambar 4. 2.	Model Implementasi Kebijakan Mazmanian.....	50
Gambar 4. 3.	Model Implementasi Kebijakan menurut Hoogwood & Gun.....	52
Gambar 4. 4.	Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards III .....	54
Gambar 4. 5.	Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Carl E. Van Horn .....	61
Gambar 4. 6.	Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle .....	63
Gambar 4. 7.	Model Implementasi Kebijakan menurut Ricard Elmore Michael LipkyHjem & David O. Porter ...	66
Gambar 4. 8.	Model Implementasi Kebijakan menurut jan Merse .....	67
Gambar 4. 9.	Model Implementasi Kebijakan menurut Warwic .....	68
Gambar 4. 10.	Model implementasi Kebijakan menurut Ripley dan Franklin .....	69
Gambar 4. 11.	Model Implementasi Kebijakan menurut Charles Jones .....	69
Gambar 4. 12.	Model Implementasi Kebijakan menurut Nakamura & Smallwood .....	71
Gambar 4. 13.	Model Jaringan .....	72
Gambar 4. 14.	Model Matriks Ambiguous Konflik Matland .....	73
Gambar 4. 15.	Model Implementasi Lewis dan Flynn (1978).....	76
Gambar 4. 16.	“Kumpulan” Organisasi .....	77
Gambar 4. 17.	Model Implementasi Kebijakan menurut Goggin dkk .....	79



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Desa (DD) secara jelas tertuang dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, desa memiliki peluang untuk bangkit dan membangun secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini bisa dilihat dari amanat Undang-Undang dimana desa di Indonesia mendapatkan transfer dana langsung dari APBN. Kebijakan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa serta wujud penguatan otonomi desa.

Dengan adanya dana desa diharapkan desa dapat lebih mandiri dan dapat membiayai kegiatan - kegiatan di desa secara swakelola. Adapun penggunaan dana desa di peruntukan bagi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang pembangunan desa meliputi yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar meliputi pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi energi dan informasi dan komunikasi.
2. Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas.

Salah satu urgensi Dana Desa yakni menempatkan desa sebagai basis desentralisasi, kebijakan itu merupakan instrumen yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan sisi lain menjadi arena bagi masyarakat dan elemen-elemen yang

# BAB 2

## KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA

### A. Administrasi Negara

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradiganya sejak Wilson. Paradigma merupakan suatu cara pandangan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Keban, 2004 : 29). Apabila suatu cara pandangan tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis (“anomalies”), kepercayaan terhadap cara pandangan tersebut menjadi luntur, dan cara pandangan yang demikian menjadi kurang beribawa. Orang mulia mencari cara pandangan yang lebih sesuai, atau dengan kata lain muncul suatu paradigma baru.

Perkembangan ilmu administrasi publik dimana “anomalies” pernah terjadi beberapa kali, dan terlihat pada pergantian cara pandangan yang lama dengan yang baru, sebagaimana diungkapkan oleh Henry (1995:21-49). Nicholas Henry mengungkapkan bahwa standar suatu disiplin ilmu, seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski, mencakup fokus dan locus. Fokus mempersoalkan “*what of the field*” atau metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan (kekhususan bidang tersebut). Sedang locus mencakup “*where of the field*” atau medan atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan. Berdasarkan dua kategori bdisiplin tersebut (locus dan fokus) telah terjadi lima paradigma dalam

# BAB 3

## KEBIJAKAN PUBLIK

### A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *Public policy*, namun untuk kebutuhan kita menurut Riant Nugroho (2011:96) ada baiknya kita merumuskan definisi yang sederhana. Pada dasarnya kebijakan publik terbentuk dari dua kata : kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah *anauthoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal dan informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terkait dengan sesuatu isu tertentu. Jadi, publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar stakeholders, publik adalah *a sphere where people become citizen a space where citizen interact, where state and society exist*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal dan memasuki pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Dengan demikian, kebijakan publik adalah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun teknis yang pemahamannya dikenal dengan istilah keputusan termaksud juga ketika pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus isu terkait.

# BAB 4

## MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pada dasarnya suatu kebijakan akan memberi makna yang lebih berarti ketika kebijakan tersebut masuk dalam tahapan implementasi. Oleh karena itu implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu suatu model akan memberikan gambaran kepada secara bulat lengkap mengenai objek, situasi atau proses, komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek situasi atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen - komponen itu satu dengan yang lainnya.

Oleh Tachjan (2006:37) dikatakan suatu model implementasi kebijakan terdiri dari komponen komponen atas :

1. Program kebijakan yang dilaksanakan ;
2. *Target groups* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
3. Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi tersebut;
4. Faktor lingkungan (fisik sosial budaya dan politik)

### A. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang paling klasik diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (2011:627), menegaskan bahwa: "implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik implementor, dan kinerja kebijakan publik". Beberapa

# BAB

# 5

# KEBIJAKAN DANA DESA

## A. Kebijakan Penggunaan Dana Desa

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer keKabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber : Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Abdullah, M. Syukur, 1987. *Administrasi Pembangunan (Bunga Rampai)*. Ujung Pandang : Unhas.
- Anderson, James E., 1979. Second edition. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Barzelay, M. dan B.J. Armajani, 1997. *Breaking Through Bureaucracy. Dalam Classic Of Public Administration*, diedit oleh J.M. Shafritz dan A.C. Hyde. New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Bromley, Daniel W., 2009. *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Basil Blackwell Ltd.
- Bungin, Burhan, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Caiden, G.E., 1982 *Public Administration*. Second Edition. California: Palisades Publishers
- Chander, R.C. & J.C. Plano., 1988. *The Public Administration Dictionary*. Second Edition, Santa Barbara: CA:ABC-CLIO Inc.
- Creswell, W. John, 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Ed. Ketiga. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Denhardt, J.V. and Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe.
- Domain, Tjahjanuli, 2010. *Kebijakan Kerjasama Antara Daerah dalam Perspektif Sound Governance*, Surabaya: Penerbit Jengala Pustaka Utama.

- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 2009. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington Dc.: Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, G.H. 1997. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Garson, G.D. and E.S. Overman, 1991. *What is public Management Today: The search for anorganizing paradigm*. Dalam *Public Management: The essential readings*, Diedit oleh Ott, J.S., A.C. Hyde, dan J.M. Shafriz. Chicago: LyceumBooks/Nelson-HallPublishers.
- Goodnow, F.J., 1900. *Politics and Administration*, New York, Macmillan, also Russell and Russell (1967)
- Grindle, Merille.S (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Hecllo, H., 2002. *Review Article: Policy Analyssis*. British Journal of Political Science, 2.
- Henry, Nicholas, 1995. *Public Administration & Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall-Inc.
- Hogerwerf, A., 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Imawan, Riswandha, 2005. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Perbandingan Adiministrasi Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jenkins, W.L., 2008. *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. New York: ST. Martin's Press.

- Jones, C.O., 1992. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, Rajawali. Judul asli, 1984, *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Wadsworth, Inc.
- Kadji, Yulianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Realitas*. Tulung Agung: Cahaya Abadi.
- Keban, Yeremias. T., 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kettl, D. F., 1993. *Public Administration: The State of the Field*. Dalam *Political Science: The State of the Discipline II*, diedit oleh Ada W. Finifter. Washington DC: the American Political Science Association.
- Kumoroto, Wahyudi. 2004. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta
- Khun, T. 2008. *Peranan Paradigma dalam Revolusi Sains*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian Daniel A dan Sabatier Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*. Grenview Illinois : Scott Foresman and Company.
- Meter, Donald, Van and Carl E. Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework" in Administration and Society*, Beverly Hill, Sage Publication.
- Moleong, Lexi J., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, A.R. 2003. *Perkembangan dan Penerapan Studi Kebijaksanaan Dilihat Dalam Kaitan Disiplin dan Sistem Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mustopadidjaja, A.R. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.



- Nasution, S., 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant, 2011. *Public Policy*. Edisi Ketiga, Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pinto, R.F., 1994. *Governance Approach to Civil Service Reform*. Canada: Canadian Center For Management Development.
- Peterson, S.A., 2003. *Public Policy*. Dalam *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Diedit oleh Jack Rabin. New York: N.Y. Marcel Dekker.
- Presman, J and Wildavsky. A. 2001. *Implementation*. Berkeley : University of California Press.
- Rakhmat, 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta, Pustaka Arif.
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen RTH. PuslitKP2W Lemlit Unpad
- Said, Z. A. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Alfabeta
- Waldo, D., 1991. *Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Media Pressindo.

**Sumber : Jurnal, Tesis, Desertasi, Penelitian**

- Direktoral Jendral Perimbangan Keuangan. 2014. *Roadmap Dana Desa 2015-2019*. Kemenkeu: DPJK.
- Jurnal GoodGovernance*. Vol.3 No.1, Mei 2004.
- Jurnal Berdaya*, Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Vol III No.2 Februari 2005

- Jurnal Bina Desa, (2015) *Rindu Hadirnya Wajah Negara, Telaah Hasil Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI.
- Jurnal Bina Desa, (2015) *Rindu Hadirnya Wajah Negara Jilid II, Telaah Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Selatan*, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI.
- Suryaden, (2016), *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*, [https : // suryaden.com>pangreh](https://suryaden.com>pangreh)
- Yanhar Jamaludin 2015, Akuntabilitas penggunaan dana desa di Indonesia Tahun 2015, Jurnal Ilmiah administrasi public dan pembangunan
- Yanhar Jamaludin, Asep Sumaryana 2018, Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah, jurnal Ilmu pemerintahan dan sosial politik UMA. Volume 6. Nomor. 1. Hal: 14- 24
- Intan Mutia, Liliana liliana, 2017, Pengelolaan Keuangan dana desa, jurnal akuntansi MultipAridagma, Volume 8. Nomor. 2. Hal: 14- 24
- Ellectrananda Anugrah Ash-Shidiqq, Hindrawan Wibisona, 2018, Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan Korupsi Pengelolaan dana desa, Volume 4. Nomor. 1. Hal: 110- 131
- Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016 Otonomi desa dan Efektivitas dana desa Volume 13. Nomor. 2

### **Sumber : Dokumen**

- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang  
Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan  
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata  
Cara Pengalokasikan Penyaluran Penggunaan Pemantauan  
dan Evaluasi Desa

Peraturan Bupati Poso No 7 Tahun 2017 tentang Tata cara  
pembagian dan penetapan rincian dana desa

## TENTANG PENULIS

**Dr. Mohammad Rusli Syuaib, S.Sos., M.Si.**, lahir di Poso, 8 Februari 1976. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Sintuwu Maroso. Menempuh Pendidikan Dasar di SD Negeri 6 Poso Tamat Tahun 1989, SMP Negeri 2 Poso Tamat Tahun 1992, SMA Negeri 1 Poso Tamat Tahun 1995, lulus sebagai Sarjana Sosial di Universitas Tadulako Palu Tahun 2000, Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako Palu Tahun 2011, dan Doktor Ilmu Sosial BKU Kebijakan Publik Universitas Tadulako Tahun 2020.

Mohammad Rusli Syuaib, pernah bekerja sebagai Komisioner Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Poso tahun 2003-2008, Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekertaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022, Tim Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022, Tim percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022, Tenaga Ahli Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2022, Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Sekertariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 dan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD).

Di Universitas Situwu Maroso, Mohammad Rusli Syuaib, mengabdikan dirinya sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik hingga tahun 2015, Dekan Fakultas Fisip Tahun 2015-2019, Ketua Lembaga Penelitian Tahun 2019-2023, Wakil Rektor Bidang Sekertariat Humas serta Bantuan Hukum Tahun 2019-2023, Wakil Rektor Bidang Keuangan Tahun 2019-2023, Wakil Rektor Bidang Keuangan dari Tahun 2023 sampai sekarang, dan Senat Universitas Sintuwu Maroso.

Beliau juga aktif diberbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan serta keagamaan seperti Asosiasi perguruan Tinggi Swasta Sulawesi Tengah (APTISI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso, Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Poso, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Tadulako.